



**PUTUSAN**  
**Nomor 358 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA TANGERANG**, tempat kedudukan di Jalan Satria - Sudirman No. 1, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15123;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/82-Bag.Huk/2021, tanggal 23 April 2021 yang disubstitusikan kepada Sucipto, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-70/M.6.11/Gd.1/04/2021, tanggal 26 April 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**YAYASAN AL MUHAJIRIN PONDOK BAHAR**, yang diwakili oleh DR. Baharuddin, MBA., M.M., dan Romi Ramdon Ginanjar, jabatan Ketua dan Sekretaris Yayasan Al Muhajirin Pondok Bahar;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Damai Hari Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada DH Lubis & Partners, beralamat di Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-DHL/PER/VI/2020, tanggal 24 Juli 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 Tertanggal 22 Mei 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun: 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan Surat Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-DINPERKIM/X/01 Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 451.1/Kep.393-Bag.Kesra/2020 Tertanggal 22 Mei 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor: 451.1/SK.186-Um Tahun: 89 Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Kepentingan Sarana Ibadah Dan Surat Walikota Tangerang Nomor: 593/1578-DINPERKIM/X/01 Tentang Persetujuan Penggunaan Lahan Untuk Fasilitas Penunjang Masjid Al Muhajirin;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 38/G/2020/PTUN-SRG, tanggal 25 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 38/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan *juncto* Pasal 21

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan serta Asas Ketidakberpihakan, dimana asas tersebut mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dimana hal ini terbukti dari laporan masyarakat dan hasil peninjauan lapangan sebagai dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, yang mana Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap netral dan mengayomi masyarakat, apabila terjadi konflik sosial seperti ini hendaknya Tergugat/Pemohon Kasasi terlebih dahulu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas serta melakukan komunikasi dua arah baik ke masyarakat langsung dan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, oleh karenanya keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA TANGERANG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 358 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001